

DAFTAR PUSTAKA

Buku

I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2017.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia Publishing, 2006.

Mohamad Hidayat Muhtar, "BAB 2 Konstitusionalisme dan Prinsip-Prinsip Konstitusi," *Hukum Tata Negara 17*, Banten: PT. Sada Kunia Pustaka, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Topo Santoso dan Ida Budhiati. *"Pemilu Di Indonesia"*. Sinar Grafika, Jakarta 2019.

Jurnal dan skripsi

Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai Dan Bermartabat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3, 2016.

Al-Ra'zie, Zakaria Habib dan Wahyudi, Heru, "KONFLIK KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PROYEK PEMBANGUNAN : STUDI KASUS PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017" *JURNAL ADHIKARI*, 1(3), 131-140, 2022.

Andri Yanto, Nabilla Azzahra, Azzura Gladisy, Mohammad Mardifa Zakirin, dan Muhammad Syaiful Anawar, "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan oleh Pemerintah Daerah dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bangka Belitung," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2, 2023.

Anggraini, Sela, "ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN BERDASARKAN PASAL 201 AYAT (9) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH." *Thesis*. 2023.

Anugerah, Dadang, *Marketing Politik: Urgensi dan Posisinya dalam Komunikasi Politik*. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 5(2), 575-598, 2011.

Anugrah, Fajrian Noor, "ANALISIS RELEVANSI PENUNJUKAN ANGGOTA TNI/POLRI SEBAGAI PENJABAT (PJ) KEPALA DAERAH." *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(1), 121-134, 2023.

Ardiansyah dan Rosita Candra Kirana, *Kedudukan dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*, 2024.

ASMAMAW ALEMAYEHU SHELEMO, *Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip GOOD GOVERNANCE*, *Nucl. Phys.*, vol. 13, 2023.

Christine S. T. Kansil and Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing, "Arti Dan Makna Memahami Konsep Konstitusionalisme & Demokrasi Dalam Konteks Implementasi Sistem Tata Negara," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2, 2024.

Corra Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 2013.

Dadan Ramdani, "Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1, 2022.

Dadang Sufianto, "Pasang Surut Otonomi Daerah di Indonesia," *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 3, no. 02, 2020.

Dharma, Agung Eka Mulya, and Khairani Khairani, "Analisis Yuridis Normatif Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Otonom Dan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 1: 104-116, 2022.

Dian Bakti Setiawan and Zahara Zahara, "Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sebagai Wewenang Gubernur Dalam Kedudukan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah," *UNES Law Review* 5, no. 2, 2022.

Dio Ekie Ramanda, "Menata Ulang Kewenangan Mengangkat Penjabat Kepala Daerah," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6, no. 3, 2022.

Dkk Rika Widianita, "TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP LEGITIMASI PENJABAT KEPALA DAERAH SEBAGAI PENGGANTI KEPALA

DAERAH DEFINITIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I, 2023.

Esti Nuriani, “Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2, 2019.

Fabian Riza Kurnia and Rizari Rizari, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah,” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 11, no. 2, 2019.

Fahmi Assulthoni, “Studi Kritis Tentang Konstitusionalisme Islam Modern Perspektif Abdullahi Ahmed An-Na’im,” *Kabillah: Journal of Social Community* 2, no. 2, 2017.

Firna Afrianti dan Kusnandi Umar, “Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Demokratis” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah* 6, no.1, 2025.

Frederic W. Nalle, Kamilaus K. Oki, dan Putra. M.M Sangaji, "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen* 17, no. 1, 2021.

Hardodi, *Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah oleh Penjabat*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 19, No. 2, 2023.

- Hario Danang Pambudhi, "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1, 2023.
- Irfani, Hafid dan Alamanda, Asri Elies, "Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah". *Justitiable*, 6(2), 2024.
- Kurniasih Evi Satispi, "Bab II Tinjauan Pustaka Mengenai Pengertian Kewenangan," 2019.
- Kuswan Hadji et al., "URGENSI PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH" 3, no. 8, 1986.
- Laode Harjudin, La Tarifu, Harnina Ridwan, La Ode Muhammad Elwan. "Menggugat Penunjukkan Penjabat (PJ) Kepala Daerah Tanpa Pemilihan. Volume 5 No 4, 2022.
- Lobubun, Muslim, Yohanis Anthon Raharusun, and Iryana Anwar, "Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia" Volume 4, No 2, 2022.
- M. Arafat Hermana and Arie Elcaputera, "Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2, 2020.
- Mahmuddin, *Pengisian Kekosongan Jabatan Daerah Akibat Pilkada Serentak dalam Perspektif Demokrasi*, 2023.
- Mochammad Tommy Kusuma, Rohmah, Elva Imeldatur, Muwahid, dan Mubarok, Nafi, "PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH

MENJELANG PEMILIHAN SERENTAK 2024.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2(2), 1-33, 2024.

Muhammad Syaiful Anwar, Rafiqqa Sari, and Ndaru Satrio, “Sistem Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Perspektif Teori Pengisian Jabatan,” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1, 2024.

Mukhson, Valiant Sinka Zannuba. “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah pada Masa Pilkada Serentak.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17: 450-453, 2024.

Nababan, Simson Heskia, Yarni, Meri, & Prasna, Adeb Davega. “ANALISIS YURIDIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2023”.

Limbago: Journal of Constitutional Law, 5(1), 14-22, 2025.

Nur Kholik, “Penentuan Dana Keistimewaan Yogyakarta antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 2, no. 2, 2022.

Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2: 294-322, 2022.

R. B. Syahputra dan D. Deslianti, "Pembuatan Video Animasi 3D Kantor Gubernur Provinsi Bengkulu," *Rekursif: Jurnal Informatika* 9, no. 2, 2021.

Rahmazani. 2023. “The Problem Of Appointment Acting Officer Of Regional Head in the Transition Period Before the Election of 2024.” *Volume 20 Issue 2*, June 2023.

Raihan Ardiansyah and Rosita Candra Kirana, “Kedudukan Dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah” 4, no. 2, 2024.

Ralph Adolph, “POLITIK HUKUM PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH,” no. 1993, 2016.

Riani Bakri and Murtir Jeddawi, “Kedudukan Hukum Dan Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Legal Position and Authority of Acting Regional Heads” 6, no. 1, 2024.

Rizki Mulyaningsih, “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah,” *Lex Renaissance* 7, no. 2, 2022.

Ro’is Alfauzi dan Orien Effendi, “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 7, no. 2 2020.

Rona Indara, “Problem of Authority For Executing Task (PLT) In The Transitional Period of Regional Government Before and After The Simultaneous Elections Based On Law Number 23 Of 2014 Concerning Local Government,” *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 3, no. 3, 2023.

Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum,” *Saplaw*, 2024.

Sakinah Pokhrel, "TINJAUAN FIQH SIYASAH PADA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH OLEH WAKIL KEPALA DAERAH," *Ayaa* 15, no. 1, 2024.

Sakinah Pokhrel, "Problematika Penunjukan Penjabat Gubernur Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," no. 1, 2024.

Salsabila Desri Tiara, "*Sumber kewenangan pemerintahan*," Universitas Ekasakti, 2024.

Sartika Intaning Pradhani dan Alam Surya Anggara, "Kedudukan Laki-Laki Dalam Budaya Hukum Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 2, no. 3, 2020.

Sidauruk, Avein Dian Boruna dan Arsil, Fitra. "Tinjauan Yuridis Pengajuan RAPBD oleh Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Daerah." *JIS: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(3), 532-551, 2023.

Sugiharta, Iqbal Rifanda, Fauziyah Fauziyah, and Icha Cahyaning Fitri, "Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4: 8-8, 2024.

Syarifah Aulia, *Pengangkatan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Pasal 201 UU No. 10 Tahun 2016 Perspektif Fikih Siyasa*, (Bachelor's Thesis). *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Udiyono Basuki, "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 1, 2020.

Wilda Prihatiningtyas, "Fungsi Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah," *Airlangga Development Journal* 1, no. 1, 2017.

Yusuf Djabbar, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Gubernur Menurut UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 1, 2022.

Zamhasari, *Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2024*, Vol. 3, 2024.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 6 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (5).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 38 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65
ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65
ayat (2)

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang. Pasal 201 ayat (10)

Artikel dan web

Diakses pada <https://www.berazam.com/read-137553-syamsuar-mengundurkan-diri-dodi-wakil-gubernur-riau-seharusnya-diangkat-sebagai-gubernur-riau%20definitif.html#sthash.YTRK5aVT.ecOpmt5X.dpbs>. Pada
13 November 2024 Pukul 20.38

Diakses pada <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-habis-masa%20jabatan-pada-2023-ini-daftarnya>. Pada
14 November 2024 pukul 23.10.

Diakses pada <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-temukan-3-maladministrasi-proses-pengangkatan-pj-kepala-daerah>. Pada
10 Maret 2025 Pukul 14.01.

Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/penjabat-kepala-daerah-dan-tantangan-menjalankan-kewenangannya-lt633ae7947c4ad/> pada 08 Maret 2025 Pukul 14.27.